



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN PENILAIAN KESESUAIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ZAKIYAH**
2. Jabatan : **DEPUTI**
3. NHK : **193856**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 4.786.986.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/100 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 462.300.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 138 m²/60 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 276.000.000
3. Tanah Seluas 150 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 229 m²/130 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 687.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 203 m²/45 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 609.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m²/36 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 342.000.000
7. Tanah Seluas 611 m² di KAB / KOTA BEKASI, WARISAN Rp. 672.100.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 26 m²/26 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 600.000.000
9. Tanah Seluas 557 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 876.161.000
10. Tanah Seluas 474.75 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 142.425.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 719.000.000



1. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 249.000.000
2. MOBIL, HONDA CIVIC HONDA CIVIC 1.5 TC CVT ES Tahun 2018, HADIAH Rp. 470.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 17.275.750

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 481.719.219

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 6.004.980.969

III. HUTANG Rp. 200.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.804.980.969

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.